

## STUDI KELAYAKAN DAN ANALISIS KEBUTUHAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KARAKTER DAN RESTORASI SEKOLAH (*FULL DAY SCHOOL*) DI SMP SE-KOTA BANJARMASIN

Hamsi Mansur <sup>1\*</sup>, Jumadi <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, Jl. Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, Jl. Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123, Indonesia

\*Surel: hamsimansur58@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program PPK dan *full day school*, dan hambatan dalam mengimplementasikan program PPK dan *full day school* atau tepatnya bertujuan untuk: (1) Mengungkap dan mengetahui secara mendalam kesiapan SMP se Kota Banjarmasin dalam upaya menyelenggarakan program PPK dan *full day school* ditinjau dari SDM, sarana-prasarana, program pendidikan, dan keuangan sekolah. (2) Untuk mengetahui secara detail prasyarat yang dibutuhkan sekolah khususnya SMP se- kota banjarmasin dalam rangka menyelenggarakan 'program PPK dan *full day school*'. (3) Untuk mengetahui tantangan ke depan sekolah-sekolah di kota Banjarmasin khususnya SMP dalam melaksanakan 'program PPK dan *full day school*'. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Subjek penelitian ini adalah SMP di Kota Banjarmasin. Penelitian ini dilaksanakan di SMP se- Kota Banjarmasin pada bulan Agustus – Oktober 2017. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen utama adalah peneliti dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Data dianalisis dengan menggunakan model Miles and Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Implementasi program PPK dan *full day school* adalah sebagai berikut: (a) Kegiatan belajar mengajar mewajibkan peserta didik berada di sekolah mulai dari pagi hari hingga sore hari (*fullday school*) (b) Nilai yang diajarkan di SMP-SMP yang menyelenggarakan program PPK dan *full day school* adalah: nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, mandiri, cinta tanah air, peduli lingkungan dan tanggung jawab (c) Muatan kurikulumnya adalah mulok wajib, pelajaran tambahan, ekstrakurikuler wajib, ekstrakurikuler pilihan, serta kegiatan insidental (d) Selain kegiatan belajar mengajar di kelas, SMP penyelenggara program PPK dan *full day school* menerapkan beberapa kegiatan dan pembiasaan-pembiasaan positif setiap hari (*daily life activity*) 2. Faktor pendukung dalam implementasi program *fullday school* adalah (a) Lokasi strategis (b) Kegiatan yang variatif (c) Prestasi khususnya di bidang keagamaan (d) Pendidik muda (e) Kerja sama yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua. Faktor penghambat dalam implementasi program *fullday school* di SMP yang belum menyelenggarakan *full day school* adalah (a) Ruang terbatas (b) Sumber dana (c) Program (d) SDM (e) sarana dan prasarana berupa media pembelajaran dan (f) factor keluarga.

**Kata Kunci:** Studi Kelayakan, Penguatan Pendidikan Karakter, *Full day School*

### 1. PENDAHULUAN

Aspek pendidikan adalah aspek terpenting dalam membentuk karakter bangsa. Dengan mengukur kualitas pendidikan, maka kita dapat melihat potret bangsa yang sebenarnya, karena aspek pendidikanlah yang menentukan masa depan seseorang, apakah dia dapat memberikan suatu yang membanggakan bagi bangsa dan dapat mengembalikan jati diri bangsa atau sebaliknya. Karakter bangsa tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan harus dibentuk, dilatih, dan dikelola secara bertahap. Pembentukan karakter bangsa merupakan tanggung jawab bersama, guru, tutor

dan seluruh komponen bangsa untuk berkomitmen membentuk, membangun dan mempertahankannya.

Beberapa bulan ini, dunia pendidikan kita disibukkan dengan polemik pro-kontra penerapan *full day school* sebagai wujud dari implemintasi program penguatan pendidikan karakter. Program ini merupakan salah satu dari program nawacita revolusi mental yang digagas pemerintahan Jokowi-JK. Untuk bidang pendidikan upaya realisasasinya dengan penguatan pendidikan karakter (selanjutnya dibilang PPK) yang dikemas dengan sistem *full day school*. Untuk menguatkan kebijakan baru ini, pemerintah kemudian mengeluarkan Permen No. 87 Tahun 2017.



Isi dari Permen tersebut pada pasal pertama berbunyi antara lain: *pertama*, Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). *Kedua*, Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah. *Ketiga*, Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. *Keempat*, Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Sepintas dari penjelasan Permen pada pasal pertama tersebut tidak ada keharusan bagi sekolah menyelenggarakan pendidikan sampai 8 Jam setiap hari dan aktivitas persekolah dilakukan mulai dari hari senin sampai hari jumat. Artinya program PPK sebagai wujud implemintasi program gerakan nasional revolusi mental era pemerintahan Jokowi-JK untuk dunia pendidikan tidak harus merubah manajemen persekolahan yang awalnya anak-anak 6 hari di sekolah menjadi 5. Sekolah punya kebebasan dalam memilih antara 5 atau 6 hari, asalkan tujuan utama dari dilaksanakannya PPK dapat tercapai. Urusan apakah sekolah akan enam hari atau lima hari itu urusan teknis sekolah, bukan urusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, meski selama hampir dua dekade di masyarakat ada sekolah yang enam hari dan ada sekolah yang lima hari, hal itu tidak menimbulkan *pro* dan *kontra* karena dasarnya adalah manajemen berbasis sekolah (MBS), sehingga tidak terjadi penyeragaman. Sekolah-sekolah yang merasa cocok untuk menerapkan konsep FDS dipersilakan, tapi yang akan tetap melaksanakan enam hari sekolah juga dipersilakan. Demikian pula daerah, ada daerah yang melaksanakan lima hari sekolah, seperti DKI Jakarta, tapi mayoritas daerah tetap memilih melaksanakan enam hari kerja.

Pada hakekatnya konsep *full day school* dan lima hari sekolah bukan konsep baru. Sejak reformasi 1998, banyak sekolah telah menerapkannya. Langkah sejumlah sekolah itu termasuk dalam kategori manajemen berbasis sekolah (MBS). Mengingat sekolah yang lebih tahu kondisi sekolahnya, maka sekolah diberi kebebasan untuk mengambil kebijakan teknis untuk sekolahnya sendiri. Agar kebijakan sekolah tersebut memiliki landasan hukum yang kuat, ada UU Sisdiknas No.

20/2003 pasal 51 ayat (1): "Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah".

Selain dari pada itu, konsep *full day school* ini berawal dari kebutuhan dan mobilitas masyarakat yang tinggi sehingga kemudian muncullah konsep pendidikan baru yang dinamakan *full day school* (Basuki 2007). Konsep *full day school* berbeda dengan sekolah *reguler* pada umumnya atau *half day school*. *Half day school* merupakan sekolah setengah hari yang berlangsung dari pagi sampai siang. *Full day school* merupakan sekolah sepanjang hari atau proses belajar mengajar yang dilakukan mulai pukul 06.45-15.00 dengan waktu istirahat setiap dua jam sekali (Baharudin 2010: 221). Upaya ini dilakukan agar program-program penanaman nilai-nilai karakter bangsa dilakukan sendiri oleh sekolah, tentunya dengan pertimbangan *cost*, SDM, sarana, dan program yang matang.

Selain daripada itu, sebelum diterbitkannya Permen No. 87 Tahun 2017 pembentukan kepribadian anak dengan penanaman nilai yang positif sudah diatur dalam buku panduan pelaksanaan pendidikan karakter yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Mulai tahun ajaran 2011 terdapat 18 nilai karakter yang harus ditekankan dalam proses pendidikan pada bangsa ini, diantaranya religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Pembentukan kepribadian ini dilasankakan mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak. Namun untuk siswa Sekolah Dasar dalam penanaman sikap porsinya lebih besar daripada sekolah menengah.

Alasan mendasar berkenaan porsi penanaman nilai karakter karena menurut Hurlock sekolah merupakan faktor penentu bagi perkembangan kepribadian anak. Pada usia sekitar 7 tahun, maka anak akan masuk ke jenjang pendidikan dasar (Yusuf 2007: 54). Penanaman nilai serta pembentukan kepribadian yang baik sejak dini diharapkan dapat mencetak generasi penerus bangsa yang unggul, sehingga lahirah individu yang tidak hanya pandai namun juga berwatak baik. Sadulloh (2011: 197) menyatakan bahwa sejatinya pendidikan di sekolah juga akan mempengaruhi pembentukan pola tingkah laku seseorang.

Sekolah Dasar sebagai jenjang pendidikan dasar diharapkan dapat mendidik anak dengan nilai karakter dan kepribadian yang baik sesuai amanat Undang-Undang dan tidak hanya terfokus pada pengetahuan. Wibowo (2012: 36) menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan yang menanamkan dan mengembangkan karakter luhur kepada anak didik, sehingga mereka memiliki karakter luhur itu, menerapkan dan mempraktikkan dalam kehidupannya. Pendapat yang sama dikemukakan Koesoema (2007: 115) mengatakan bahwa pendidikan karakter menjadi semakin mendesak untuk diterapkan dalam lembaga pendidikan, mengingat berbagai macam perilaku yang non-edukatif marak dipraktikkan generasi muda bangsa.

Begitu besar peranan Sekolah Dasar sebagai tahapan awal dalam mendidik anak karena akan dijadikan sebagai fondasi dalam melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta menjalani kehidupan yang lebih kompleks. Sekolah diharapkan menciptakan lulusan tidak hanya unggul secara akademik tetapi memiliki budi pekerti dan kepribadian baik sesuai cita-cita dan tujuan penyelenggaraan pendidikan nasional. Selin itu pula, sekolah diharapkan dapat mengembangkan sikap peduli siswa, mempraktikkan disiplin moral, membangun kepekaan nurani, dan sikap positif lainnya. Menurut Suharjo (2006: 4) Sekolah Dasar memiliki visi yakni sebagai lembaga pendidikan yang unggul dalam pengembangan akademik maupun non akademik, serta peduli terhadap lingkungan dan kemandirian siswa yang dilandasi iman dan taqwa. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 23 tahun 2006 menjabarkan bahwa pendidikan dasar memiliki tujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Hal tersebut tentunya harus mendapatkan dukungan dari seluruh stake holder. Artinya seluruh komponen warga sekolah mulai dari guru, siswa, tenaga kependidikan, komite sekolah dan orang tua siswa mendukung secara total. Karena bagaimanapun juga orang tua adalah guru moral pertama bagi anak atau dalam ungkapan Agama orangtua sebagai *Al-ummu awwalul madrasah*. Ibu adalah sekolah pertama adalah sebuah ungkapan yang sangat tepat dan indah untuk menerangkan betapa penting dan urgennya peran seorang ibu dalam mendidik anak. Mulai anak dalam kandungan ibu berupa janin kemudian keluar dari rahim ibu dalam keadaan lemah tak berdaya serta pada masa awal kehidupannya dalam keluarga. Keluarga

menjadi lingkungan pertama yang dijumpai oleh anak yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan karakter anak. Keluarga menjadi sumber pendidikan utama bagi anak, sehingga orang tua khususnya ibu menjadi tempat anak belajar, mengambil contoh dan identifikasi nilai-nilai yang diadopsi oleh anak.

Berawal dari pemaparan di atas, kiranya sangat menarik apabila dikaji secara mendalam perihal kebijakan baru pelaksanaan program pendidikan karakter (PPK) dan Restorasi Sekolah yang dikenal dengan *'full day school'*. Kajian yang dimaksud ialah melakukan pemetaan kesiapan sekolah-sekolah baik dalam SDM, sarana-prasarana, program, keuangan, dan berbagai kebutuhan lainnya untuk menyelenggarakan *full day school*. Pada kesempatan ini, pemetaan yang dilakukan peneliti ialah untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) di seluruh Kota Banjarmasin.

## 2. METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari informan, tempat dan peristiwa, dan dokumen. Informan adalah kepala sekolah, guru dan siswa di lingkungan SMP se-Banjarmasin. Tempat dan peristiwa Proses penerapan Program Penguatan Pendidikan Karakter & *full day school* adalah sekolah SMP se-Banjarmasin yang dipilih dengan menggunakan metode purposif sampling. Jadi dalam penelitian ini peneliti menentukan sekolah-sekolah mana yang akan diteliti berdasarkan kriteria yang dibuat sebelumnya. Penentuan sekolah berdasarkan program sekolah. Peneliti menentukan 2 sekolah tiap kecamatan yang sedang dan belum melaksanakan/mengimplemintasikan PPK dan *Full Day School*. Dokumen yang menjadi sumber data adalah segala dokumen baik berupa foto, file, maupun lembaran yang berkaitan dengan implemintasi PPK dan *Full Day School* di tempat sasaran penelitian. Berdasarkan sumbernya menggunakan data yang diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan, dan data yang diperoleh melalui dokumen perencanaan program, pelaksanaan program sekolah yang berkenaan dengan PPK dan *Full Day School*, dan berdasarkan teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi yang merupakan gabungan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dan *full day school*, bagi sekolah

yang mampu mengimplemintasikannya mengadakan penyesuaian program-program akademik seperti: pelatihan bagi guru-guru, pengaturan jadwal mata pelajaran, strategi pembelajaran, sarana dan prasarana yang memadai, pendalaman materi, pengembangan dan penanaman nilai-nilai agama dan nilai-nilai kebangsaan baik dalam kegiatan Intra dan Ekstra Sekolah. Berdasarkan hasil wawancara, hasil analisis dokumen, dan hasil observasi yang peneliti lakukan terhadap sekolah-sekolah yang menyelenggarakan PPK dan *Full Day School* pada prinsipnya memiliki pengalaman dan latar belakang berbeda. Ada sekolah yang benar-benar siap mengimplemintasikan, ada yang setengah hati dan ada pula yang terpaksa karena pemerintah memaksa sekolah menyelenggarakan PPK dan *full day school*. Kondisi seperti ini dipengaruhi latar belakang dan kondisi sekolah. Sekolah yang memiliki SDM baik, pengalaman cukup dalam mengembangkan program-program sekolah, sarana-prasarana memadai, pembiayaan yang cukup dan dukungan dari komite serta orangtua sekolah tentunya lebih siap menyelenggarakan daripada sekolah yang serba memiliki keterbatasan dalam segala aspek.

Kondisi tersebut dapat dilihat dari hasil data SMPN 6 Banjarmasin dan SMP Islam Sabilal Muhtadin. Kedua sekolah sebelum ada program PPK dan *Full Day School* terlebih dahulu telah mengembangkan program penguatan pendidikan karakter baik dalam kegiatan intra maupun ekstra kurikulum. Bahkan kedua sekolah mengembangkan hiden kurikulum yang programnya berkenaan dengan penanaman nilai-nilai relegius dan nilai kebangsaan. Keberhasilan kedua sekolah tersebut dalam menerapkan PPK dan *Full day school* tidak terlepas adanya dukungan dari berbagai aspek sebagaimana dijelaskan di atas.

Berbeda dengan SMPN 6 dan SMP Islam Sabilal Muhtadin, SMPN 10 Banjarmasin sebagai salah satu sekolah yang juga mendapatkan kepercayaan dari pemerintah menerapkan *full day school* dalam realisasinya kurang optimal. Sekolah ini kurang memiliki pengalaman yang cukup layaknya kedua sekolah tersebut. Begitupun halnya dengan fasilitas sekolah, pendaanaan dan dukungan dari orangtua yang minimalis turut membantu kurang optimalnya pelaksanaan PK dan *full day school* di sekolah tersebut.

Pada kenyataannya, pemerintah sebelum menginstruksikan sekolah mengimplemintasikan PK dan *full day school*, pemerintah terlebih dahulu melakukan pembinaan dan sosialisasi ke sekolah-sekolah sasaran. Tujuannya adalah agar

implemintasi PK dan *Full day school* dapat berjalan sesuai sesuai tujuan. Dari hasil data di lapangan, ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dan sekolah sebelum mengimplemintasikan PK dan *Full day school* antara lain:

*Pertama*, pemerintah memberikan sosialisai ke sekolah-sekolah baik secara langsung *face to face* maupun melalui forum-forum diskusi yang difasilitasi oleh pemerintah di dinas pendidikan kota maupun kabupaten. *Kedua*, sekolah dengan difasilitasi oleh pemerintah melaksanakan pelatihan bagi guru-guru berkenaan pengembangan program pendidikan karakter. Materi pelatatihan diantaranya penyusunan program PPK, pelaksanaan program PPK, evaluasi dan penilaian PPK.

*Ketiga*, selain menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan program, sekolah juga menginventarisir sarana-prasarana dan sumber belajar yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan merealisasikan program. *Keempat*, rapat dengan komite sekolah, stake holder dan orangtua siswa. Rapat dilakukan sebagai sarana sosialisai rencana implemintasi PPK dan *Full Day School* juga upaya mendapatkan dukungan dari semua stake holder sekolah utamanya komite dan orangtua siswa.

Ketika upaya-upaya tersebut terlaksana dengan baik, kemudian sekolah mewujudkan program PPK dan *full day school*. Wujud implemintasi PPK dan *full day school* setiap sekolah tentunya berbeda-beda. Hal ini disesuaikan dengan pengalaman, kemampuan, dan kondisi sekolah namun tetap berbijak pada Permen No. 87 Tahun 2017 yaitu mewajibkan siswa satu hari di sekolah. Kondisi ini dapat dilihat dari program yang dikembangkan oleh SMPN 6 Banjarmasin. PPK dan *full day school* di SMPN 6 terintegrasi mulai dari kegiatan, intra, ekstra maupun Ko-kurikuler. Untuk kegiatan ekstrakurikuler salah satu program yang dikembangkan misalnya program penguatan pembelajaran agama. Program ini pada tataran teknisnya dilaksanakan setiap hari selasa. Penguatan pembelajaran Agama yang dimaksud ialah dengan menjalankan kegiatan keagamaan sesuai dengan ajaran agama masing-masing siswa.

Di sisi lain, berkenaan fenomena *hoax* dan *hate speech* yang menjamur di sosial media dan pelaku serta actor intelektual kebanyakan anak muda belia yang sedang dalam pencarian identitas diri serta korbannya kebanyakan anak yang duduk di bangku SMP, sekolah membekali siswa dengan program gerakan literasi. Gerakan ini dilaksanakan setiap hari di awal pembelajaran. Guru memberikan wawasan dan pemahaman literasi kepada siswa selama 15 menit setiap hari. Gerakan ini bertujuan

karena akal sehat manusia semuanya menolak adanya informasi yang bersifat *hoax*, mengadu domba, dan ujaran kebencian yang diproduksi dan disebarakan begitu massif. Untuk itu generasi muda harus dilibatkan dalam menangkal dan mencegah berkembangnya fenomena *hoax* dan *hate speech*.

Untuk merealisasikan program PPK dan *full day school* sebagaimana di atas, sekolah tidak sendirian. Mereka melibatkan semua elemen masyarakat sekolah baik dari guru, tenaga kependidikan, satpam sekolah dan kebun sekolah. Orangtua siswa yang setiap hari menjemput dan mengantarkan siswa juga terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Upaya-upaya ini dilakukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program serta mewujudkan tujuan dilaksanakannya PPK dan *full day school*.

Tentu saja selain dukungan dari berbagai pihak, peran guru sangat dominan menentukan keberhasilan pelaksanaan program. Untuk itu guru dituntut benar-benar memahami dengan baik tentang program PPK dan *full day school*. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya. Temuan-temuan dilapangan menunjukkan bahwa sekolah-sekolah penyelenggara *full day school* berusaha merencanakan pembelajaran dengan mengembangkan dan mengelola pembelajaran dalam sistem *full day school* dengan baik. Hal tersebut tampak dari struktur kurikulum yang dikembangkan, jadwal pelajaran yang ditetapkan, perangkat pembelajaran yang disusun guru berupa prota, promes, silabus, RPP, penilaian, dan remedial yang semuanya dalam spirit mewujudkan visi dan misi sekolah serta terwujudnya program PPK dan *full day school* sesuai Permen No. 87 Tahun 2017.

Berbeda dengan sekolah-sekolah yang mengimplemintasikan PPK dan *full day school*, SMP SMIP 1946 Banjarmasin dan MTs Muhammadiyah Al – Furqon belum ikut andil dalam bagian program. Kedua sekolah beranggapan bahwa rogram PPK dan *full day school* tidak cocok diterapkan di ke dua sekolah tersebut. Salah satu alasan mendasarnya berkenaan dengan kultur dan latar belakang siswa yang berasal dari kalangan kelas ekonomi menengah ke bawah. Mereka para siswa ritunitas sehari-harinya selain bersekolah, mereka juga punya kebiasaan membantu orangtua mencari nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Jika mereka terpaksa berhenti membantu orangtua mencari nafkah karena program PPK dan *full day school*, maka pendapatan dan penghasilan hidup keluarganya akan berkurang. Ketika pendapatan keluarga berkurang, tentunya kebutuhan hidup untuk hari esok seperti sandang, papan, pangan

dan kebutuhan untuk biaya sekolah sulit terpenuhi. Inilah alasan mendasar belum terlaksananya program PPK dan *full day school* di kedua sekolah tersebut. Selain alasan-alasan klasik seperti terbatasnya sarana-prasarana, minimnya anggaran, kurangnya SDM, dan tidak adanya dukungan dari komite dan orang tua siswa.

Keterbatasan tersebut lantas bukan berarti sekolah *nihil* program pendidikan karakter. Dari hasil penelitian di lapangan, kedua sekolah telah memiliki program pengembangan pendidikan karakter. Upaya ini misalnya dapat dilihat dari kegiatan sekolah di pagi hari. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, sekolah memprogram siswa membaca, mentelaah dan mengkaji kitab suci agama masing-masing. Bagi yang muslim di siang hari dan setiap hari diwajibkan shalat berjemaah dan bergiliran menyampaikan kultum. Inilah diantara beberapa program-program pendidikan karakter di sekolah-sekolah yang belum menerapkan rogram PPK dan *full day school*.

Pada kenyataannya, program PPK merupakan kebijakan bagus dari pemerintah. Semua sekolah yang sedang dan belum mengimplemintasikan memiliki pendapat yang sama. Semua sekolah mengeluarkan nada dan irama yang sama bahwa program PPK salah satu kebijakan baik dari pemerintah untuk sekolah. Akan tetapi, kebijakan program PPK dan *full day school* membutuhkan kebijakan-kebijakan lain seperti halnya kebijakan kesejahteraan ekonomi, pemerataan pendidikan, dan peningkatan kualitas guru agar program PPK dan *full day school* dapat terlaksana dengan baik. Jika tidak, maka program PPK dan *full day school* tidak ubahnya program-program dan kebijakan pemerintah sebelumnya yang hanya bagus pada tataran konseptual saja sedangkan pada tataran teknis susah diwujudkan.

#### 4. SIMPULAN

Implementasi program PPK dan *full day school* adalah sebagai berikut: (1) Kegiatan belajar mengajar mewajibkan peserta didik berada di sekolah mulai dari pagi hari hingga sore hari (*full day school*) (2) Nilai yang diajarkan di SMP-SMP yang menyelenggarakan program PPK dan *full day school* adalah: nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, mandiri, cinta tanah air, peduli lingkungan dan tanggung jawab (3) Muatan kurikulumnya adalah mulok wajib, pelajaran tambahan, ekstrakurikuler wajib, ekstrakurikuler pilihan, serta kegiatan insidental (4) Selain kegiatan belajar mengajar di kelas, SMP penyelenggaraan program PPK dan *full day school*

menerapkan beberapa kegiatan dan pembiasaan-pembiasaan positif setiap hari (*daily life activity*)

Faktor pendukung bagi sekolah yang menyelenggarakan program *fullday school* adalah (1) SDM (2) sarana-prasarana (3) pendanaan yang cukup (4) dukungan komite, orangtua siswa, dan Kerja sama yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua (5) Kegiatan yang variatif (6) Prestasi khususnya di bidang keagamaan. Faktor penghambat yang menghambat terlaksananya program PPK dan *fullday school* di SMP yang belum menyelenggarakan *full day school* adalah (a) Ruang terbatas (b) Sumber dana (c) Program (d) SDM (e) sarana dan prasarana berupa media pembelajaran dan (f) faktor keluarga.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Banyak pihak yang ikut membantu kelancaran peneliti. Untuk itu kami mengucapkan terimakasih kepada Rektor ULM dan Ketua LPPM ULM yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materil terhadap terlaksananya penelitian ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk

melakukan penelitian di SMP-SMP di lingkup kota Banjarmasin, serta mahasiswa Teknologi Pendidikan yang ikut membantu menggali data di lapangan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Baharuddin. 2010. *Pendidikan dan Psikologi Perkembangan*. ArRuzz Media, Yogyakarta.
- Basuki S. 2007. *Full Day School Harus Proporsional Sesuai Jenjang dan Jenis Sekolah*. <http://smkn1lmj.sch.id/dl/fulldayschool.pdf>. Diakses: 1 September 2017.
- Koesoema D. 2007. *Pendidikan Karakter*. Grasindo, Jakarta.
- Sadulloh U *et al.* 2011. *Pedagogik (Ilmu Mendidik)*. Alfabeta, Bandung.
- Suharjo. (2006). *Mengenal Pendidikan Sekolah Dasar Teori dan Praktek*. DIKTI, Jakarta.
- Wibowo A. 2012. *Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Yusuf S. 2007. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Remaja Rosdakarya, Bandung.

-----

